

URGENSI PENERAPAN PENDIDIKAN AKUNTANSI

BERBASIS AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN



**ANISA KUSUMAWARDANI
IRWANSYAH
LEDY SETIAWATI
YOREMIA LESTARI GINTING
FIBRIYANI NUR KHAIRIN**

**URGENSI PENERAPAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Anisa Kusumawardani
Irwansyah
Ledy Setiawati
Yoremia Lestari Ginting
Fibriyani Nur Khairin

**URGENSI PENERAPAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Penulis: Anisa Kusumawardani, dkk.

Percetakan: Tisara Grafika Salatiga

Jl. Diponegoro 98 D Salatiga

081228598985 | harriesiswanto@gmail.com

Griya Media, 2018

viii + 50 hlm, 23 cm

Cetakan pertama, Oktober 2018

ISBN 978-602-6257-50-5



**Jl. Sonotirto No. 654 Salatiga
Telp./Fax: 0298-328933
email: griya_media@yahoo.co.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf yang berjudul “**Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Sosial dan Lingkungan**”

Saat ini, kebutuhan akan model pengajaran akuntansi sosial dan lingkungan pada perguruan tinggi dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi kebutuhan akan lulusan akuntansi yang berkompotensi dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan bagi para *stakeholders*. Pengidentifikasi kebutuhan dimensi akuntansi sosial dan lingkungan dalam pendidikan akuntansi tersebut didasari oleh semakin meningkatnya ketentuan pemerintah pusat maupun daerah mengatur praktik CSR sebagai suatu indikator tata kelola baik korporasi (*good corporate governance*). Sehingga, penerapan mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan dalam pendidikan akuntansi di perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak sarjana akuntansi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk menjawab tantangan dan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin mengarah pada diperlukannya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

Berdasarkan gambaran atas realitas pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan tersebut, maka buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang akuntansi sosial dan lingkungan. Namun, penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih

banyak kekurangan sehingga saran dan kritik pembaca akan diterima dengan lapang.

Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Aamiin.

Samarinda, September 2018

Penulis

RINGKASAN

Suatu model pengajaran akuntansi sosial dan lingkungan pada perguruan tinggi dapat diwujudkan dengan mengidentifikasi kebutuhan akan lulusan akuntansi yang berkompotensi dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan bagi para *stakeholders*. Pengidentifikasian kebutuhan dimensi akuntansi sosial dan lingkungan dalam pendidikan akuntansi didasari oleh semakin meningkatnya ketentuan pemerintah pusat maupun daerah mengatur praktik CSR sebagai suatu indikator tata kelola baik korporasi (*good corporate governance*). Penerapan matakuliah akuntansi sosial dan lingkungan dalam pendidikan akuntansi di perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak sarjana akuntansi yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk menjawab tantangan dan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin mengarah pada diperlukannya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan oleh perusahaan.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dari para informan tentang sejauh mana kebutuhan akan akuntan yang juga berkompotensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Informan yang akan dilibatkan pada penelitian ini berasal dari beberapa perusahaan pertambangan di Kaltim yang merupakan *users* dari sarjana akuntansi. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dimana yang terlibat dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria yakni perusahaan tersebut terikat aturan UU No.40 Tahun 2007 serta Perda Kaltim No.3/2013, merupakan anggota dari NCSR yang menerbitkan *Sustainability Reporting* berdasarkan GRI. Teori *stakeholder* dan model kompetensi keberlanjutan profesional sebagai alat analisis untuk memaknai kebutuhan perusahaan sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi akan kompetensi profesi akuntan. Data berupa hasil interview dengan para informan yang merupakan pelaku penyusunan laporan keberlanjutan. Urgensi penerapan pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan tercermin dari hasil penelitian yang menggambarkan tidak seorangpun pelaksana pelaporan keberlanjutan di institusi adalah seorang akuntan, padahal institusi memerlukan pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan

lingkungan. Kompetensi yang dibutuhkan tersebut terdiri dari kompetensi fungsional, kompetensi personal/perilaku, kompetensi pengetahuan/kognitif, dan kompetensi nilai/etika. Sehingga penelitian ini berkontribusi bagi perguruan tinggi untuk mengetahui kompetensi keberlanjutan secara spesifik sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan peninjauan kurikulum pendidikan akuntansi.

Kata kunci: Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Kompetensi, Pendidikan Akuntansi, Pertambangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	v
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
Bab 2 AKUNTANSI LINGKUNGAN.....	7
Bab 3 <i>STAKEHOLDER THEORY</i>	9
Bab 4 <i>LEGITIMACY THEORY</i>	11
Bab 5 <i>INSTITUTIONAL THEORY</i>	13
Bab 6 PENDIDIKAN AKUNTANSI LINGKUNGAN.....	19
Bab 7 PELAPORAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN: PERSPEKTIF INSTITUSIONAL.....	21
Bab 8 TRANSFORMASI SUSTAINABILITY REPORTING MENUJU INTEGRATED REPORTING: PELUANG BARU BAGI AKUNTAN?.....	27
Bab 9 PENDIDIKAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF <i>STAKEHOLDERS</i> PERGURUAN TINGGI.....	31
Bab 10 SIMPULAN DAN SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

Bab 1

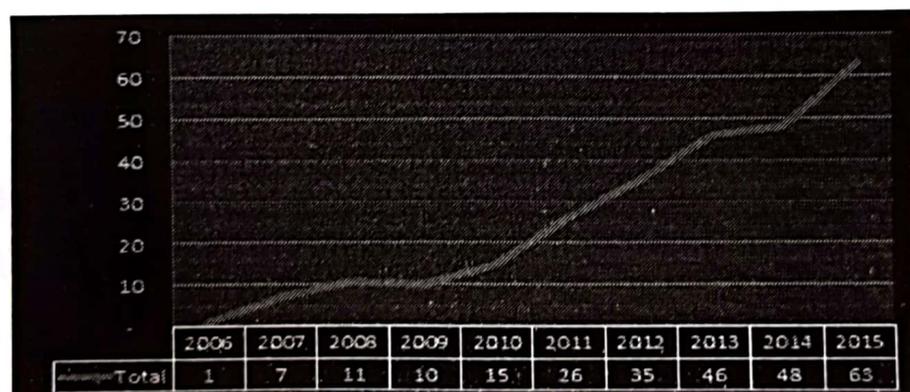
PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya waktu, pemahaman arti dan manfaat nilai usaha dalam bisnis mengalami pergeseran konsep bisnis dari *single P* yaitu *profit* menjadi 3P (*Triple Bottom Line*) (Lindawati dan Puspita, 2015). *Triple Bottom Line* yang digagas oleh Elkington (1997) ini merumuskan tiga faktor utama operasi perusahaan, yaitu faktor ekonomi dan keuntungan (*profit*), faktor manusia dan masyarakat (*people*), serta faktor lingkungan (*planet*). Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi, ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Ketiga komponen ini bersifat dinamis, serta tidak bisa lepas dari kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan konflik kepentingan. Pendekatan ini untuk memperbaiki pengambilan keputusan tentang kebijakan dan program ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat sekaligus.

Kinerja perusahaan yang mencerminkan ketiga faktor utama dalam konsep 3P ini dapat ditunjukkan dalam *Sustainability Reporting (SR)* atau laporan keberlanjutan. Laporan ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menilai sejauhmana perusahaan mengatasi isu keberlanjutan seperti kepedulian terhadap lingkungan (penghematan energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengatasi pencemaran udara) serta isu sosial seperti partisipasi perusahaan bagi masyarakat setempat. *SR* merupakan wujud riil *sustainability accounting* yang dilakukan oleh perusahaan kepada

publik. Publikasi laporan ini menjadi potensi legitimasi bagi perusahaan yang peduli kepada lingkungan atau masyarakat. Artinya masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat.

Kesadaran perusahaan yang meningkat atas pertanggung-jawaban sosial menunjukkan pentingnya laporan tahunan sebagai media pengungkapan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate social responsibility* (CSR). Peningkatan kesadaran ini nampak dari meningkatnya jumlah perusahaan di Indonesia yang mempublikasikan SR dari tahun ke tahun, seperti data yang didapat dari *Global Reporting Initiatives* (GRI), per Februari 2016 terdapat sebanyak 85 perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan laporan mereka. Tren ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Sumber: GRI

Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Organisasi yang Membuat dan Melaporkan

Selanjutnya, pelaksanaan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bersifat *voluntary* dan *mandatory*. Sifat *mandatory* hanya ditujukan bagi BUMN dan perusahaan yang mengolah atau berkaitan langsung dengan sumber daya alam (SDA). Pelaksanaan *mandatory* ini terikat oleh regulasi yang telah ditetapkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam pasal 74 ayat 1-4. Dalam perkembangannya, pelaporan tanggung jawab

sosial dan lingkungan oleh perusahaan multinasional telah menggunakan pedoman GRI dalam menyusun *sustainability report*.

Tanggung jawab perusahaan tersebut tidak hanya diatur dalam UU No.40 tahun 2007, di beberapa daerah juga dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini. Terutama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) yang memang dikenal kaya akan SDA dimana beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan berada di daerah ini. Sehingga Pemerintah Kaltim telah mengatur pelaksanaan CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim yakni Perda Kaltim No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan regulasi-regulasi tersebut, juga menjadikan *Sustainability Report* sebagai media untuk memperoleh kepercayaan dari *stakeholders*.

Fenomena ini kemudian menciptakan peluang dan tantangan tersendiri bagi akuntan. Ketika menjadi tugas unik bagi akuntan untuk mengembangkan perusahaan sesuai harapan *stakeholders*, sehingga dalam hal ini semakin dibutuhkan akuntan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntan perlu mengetahui bagaimana mengukur dan melaporkan kegiatan keberlanjutan. Dalam upaya untuk terus mendahului permintaan akan kompetensi pelaporan keberlanjutan ini, beberapa universitas di A.S. sekarang telah menawarkan program yang didedikasikan untuk akuntansi keberlanjutan. Lebih dari 900 universitas dengan program akuntansi sarjana atau pascasarjana, hanya 17 yang memiliki program perkuliahan yang sepenuhnya ditujukan untuk keberlanjutan. Selain masih minimnya penyelenggara program akuntansi keberlanjutan, masalah lainnya adalah kurangnya buku teks dan materi terkait akuntansi keberlanjutan (Sonja E. Pippin, Weber, Wong, & Bergner, 2016).

Selanjutnya, terkait dengan penyediaan sumberdaya yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi keberlanjutan juga mempengaruhi eksistensi sebuah institusi pendidikan, terutama yang posisinya berada dekat dengan area beroperasinya perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan eksploitasi alam. Eksistensi perguruan tinggi ini dapat dianalisis melalui hubungan *stakeholders* sebab baik *stakeholders* internal dan eksternal dapat memengaruhi perguruan tinggi dalam hal strategi, tujuan, kualitas pengajaran dan aktivitas lainnya (Kettunen, 2015). Permintaan *stakeholders* berdampak pada perguruan tinggi, dan bila persyaratan *stakeholders* berubah, maka perguruan tinggi perlu untuk mengevaluasi umpan balik, menentukan tujuannya dan memperbaiki prosesnya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*nya. Dengan demikian perguruan tinggi lebih berorientasi pada kebutuhan pasar dan bertanggung jawab kepada *stakeholders*nya.

Dewasa ini sangat jelas tergambar adanya unsur *market signal* dalam hal perkembangan kebutuhan *stakeholders* terkait penyajian informasi mengenai pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berarti lulusan sarjana akuntansi sudah seharusnya memiliki peningkatan kompetensi sesuai dengan perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Kesadaran dan keterlibatan institusi pendidikan tinggi dengan isu-isu sosial dan lingkungan tampak pada komitmen untuk menanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa yang berkaitan dengan etika, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan akuntan masa depan.

Peneliti mengidentifikasi tentang bagaimana kompetensi akuntan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* perguruan tinggi terkait bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Melalui identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan tersebut, maka perguruan tinggi akan dapat dengan tepat

menyiapkan sarana untuk mencapai kebutuhan *stakeholders* perguruan tinggi, dan sekaligus membangun keunggulan kompetitif bagi institusi itu sendiri. Selain itu buku monograf ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi sosial dan lingkungan.

Bab 2

AKUNTANSI LINGKUNGAN

Seiring dengan berkembangnya isu lingkungan global, berkembang pula anggapan bahwa akuntansi dalam dunia bisnis terlalu berpihak pada *stockholders* daripada *stakeholders*, sehingga konsep akuntansi sekarang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan situasi dan kehidupan yang aman berkeadilan, serta alam yang lestari dan terpelihara. Karena hal itu kemudian berkembang akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) (Idris, 2012). Akuntansi lingkungan dipertimbangkan karena menjadi perhatian bagi pemegang saham dengan cara mengurangi biaya yang berhubungan dengan lingkungan (contohnya: polusi) dan diharapkan dengan pengurangan biaya lingkungan akan tercipta kualitas lingkungan yang baik. Yang juga menjadi pendorong munculnya akuntansi lingkungan ialah kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Dalam literatur, paradigma ini dikenal dengan *the human exceptionalism paradigm* menuju *the environment paradigm* atau juga terkait dengan kemunculan konsep *triple bottom line*.

Menurut Hamid (2002) dalam Agustia (2010), pada tingkat mikro atau tingkat perusahaan, Akuntansi Lingkungan memiliki perananan penting dalam upaya perusahaan manufaktur untuk melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan. Akuntansi lingkungan memberikan peran dalam tiga perwujudan akuntansi, *pertama* akuntansi keuangan, akuntansi lingkungan berperan untuk memberikan tambahan informasi melalui pengungkapan (*disclosure*) wajar atau dalam data kuantitatif pada komponen laporan keuangan yang diterbitkan secara

berkala serta menunjukkan kegiatan dan hasil operasional perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Kedua*, Akuntansi Biaya, akuntansi lingkungan digunakan untuk alokasi biaya yang wajar dan pengendalian segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan. *Ketiga*, Akuntansi Manajemen, akuntansi lingkungan berperan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Bab 3

Stakeholder Theory

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Keberadaan sebuah perusahaan sangatlah dipengaruhi dukungan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* memberikan suatu pandangan bahwa perusahaan sebagai suatu *nexus of contract* (kumpulan kontrak-kontrak) dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai *stakeholder* perusahaan. Sedangkan menurut Freeman et al. (2004) dan Sundaram dan Inkpen (2004) dikemukakan bahwa teori *stakeholder* itu dimulai dengan asumsi nilai (*value*) secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Solihin (2009) menekankan pentingnya pengelola perusahaan untuk menyeimbangkan berbagai klaim yang bertentangan dari para pemangku kepentingan terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Dill dalam Solihin (2009) lebih menekankan pentingnya

memperhitungkan peran yang dapat dilakukan pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan. Gray *et.al* dalam Januarti dan Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi suatu perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*.

Keberadaan suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh orang-orang atau kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi. Adanya teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan tidaklah bersifat individualis dan mementingkan diri sendiri dalam menjalankan kegiatan operasinya. Teori *stakeholder* dapat mempengaruhi kebijakan organisasi karena campur tangan pihak lain sangat dibutuhkan demi keberlanjutan organisasi tersebut.

Bab 4

Legitimacy Theory

Operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun dapat terancam bila tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan. Keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakat ini tidak selamanya sejalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Legitimasi dapat dikatakan sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Ketika ada perbedaan nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan berada pada posisi terancam.

Legitimacy theory menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar organisasi tersebut dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Norma perusahaan selalu berubah

mengikuti perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.

Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi ukuran kinerja lainnya yang berkaitan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Wibisono (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga *image* dan strategi perusahaan.

Bab 5

Institutional Theory

Pemikiran yang mendasari penerapan akuntansi sosial dan lingkungan salah satunya adalah teori institusional (*Institutional Theory*), suatu teori yang didasarkan pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, organisasi harus meyakinkan masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta pantas memperoleh dukungan publik (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menjelaskan bahwa teori institusional digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Frumkin dan Galaskiewicz, 2004; Ashworth *et al.*, 2009) dimana organisasi berada.

Teori institusional berangkat dari kajian-kajian di bidang sosiologi. Emile Durkheim yang menyatakan bahwa studi sosiologi adalah studi tentang institusi. Penggunaan istilah institusi ini kemudian berkembang ke disiplin ekonomi, politik, hukum ataupun studi organisasi. Dalam ranah sosiologi organisasi ini, muncullah nama-nama seperti John Meyer, Brian Rowan, Richard Scott ataupun Lynne Zucker sebagai pembawa ide neo-institusionalisme. Dalam pandangan mereka ini, struktur organisasi formal tidak hanya merefleksikan permintaan teknis dan kebergantungan sumber daya namun juga membentuk tekanan institusional, termasuk mitos-mitos yang

dirasionalkan, legitimasi pengetahuan melalui pendidikan, profesi, opini publik ataupun hukum.

Teori institusional memberi perhatian yang mendalam dan sungguh-sungguh pada struktur sosial. Teori ini memperhatikan bagaimana struktur, seperti skema, aturan, norma dan rutin, menjadi bentuk yang bersifat otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial. Jadi dalam hal ini institusi bukan saja meliputi aturan, nilai, kebiasaan tertentu namun juga harus dilihat adanya tindakan yang terjadi dan bagaimana tindakan itu diulang (direproduksi).

Ide utama teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Zucker (1987) menyatakan bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi. Eksistensi organisasi terjadi pada cakupan organisasional yang luas dimana setiap organisasi saling mempengaruhi bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi atau institusionalisasi.

DiMaggio dan Powell (1992) menyebutnya sebagai proses imitasi atau *adopsi mimetic* sebuah organisasi terhadap elemen organisasi lainnya. Organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Kekhususan teori institusional terletak pada paradigma norma-norma dan legitimasi, cara berpikir dan semua fenomena sosiokultural yang konsisten dengan instrumen teknis pada organisasi. DiMaggio dan

Powell (1992) melihat bahwa organisasi terbentuk karena kekuatan di luar organisasi yang membentuk lewat proses *mimicry* atau imitasi dan *compliance*. Namun organisasi juga berada di bawah tekanan untuk menciptakan bentuk-bentuk sosial yang hanya terbentuk oleh pendekatan konformitas dan berisi struktur-struktur terpisah pada aras operasional.

Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme (*isomorphism*) dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Isomorfisme (*isomorphism*) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama.

Institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif (*coercive*), normatif (*normative*), dan mimetik (*mimetic*). DiMaggio dan Powell (1992), melihat ada tiga bentukan institusional yang bersifat isomorphis yaitu:

- 1) *Coersif isomorphis* yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini terjadi ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan.
- 2) *Mimesis isomorphis*, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain, biasanya disebabkan karena ketidakpastian.
- 3) *Normatif isomorphis*, karena adanya tuntutan profesional, yakni ketika orang mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan

profesional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior.

Terdapat beberapa pengidentifikasian penyesuaian organisasi pada teori institusional antara lain:

1) Penyesuaian Kategorial

Hal ini terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian akan menghasilkan struktur yang homogeny selanjutnya menjadi semacam 'kamus struktur.' Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan kognitif seperti ini karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka.

2) Penyesuaian Struktural

Hal ini disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Organisasi akan mengadopsi struktur organisasi yang spesifik (biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan). Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi seperti program keselamatan kerja atau kelompok gerakan afirmatif. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi.

3) Penyesuaian Prosedural

Organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara. Kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaknaan normatif.

4) Penyesuaian Personil

Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional (khususnya pada organisasi di Barat). Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya

perlu untuk menyewa atau menggunakan personil yang spesifik. Kebutuhan lisensi atau akreditasi biasanya harus memenuhi persentase (%) kualifikasi personil dalam posisi kunci. Sertifikat sangat penting sebagai sumber legitimasi. Kebutuhan pendidikan selalu meningkat sesuai bagian dari posisi kerja walaupun tidak jelas hubungan antara tujuan pendidikan dengan produktivitas. Hal ini terlihat jelas pada benda institusional ketimbang ketrampilan teknis yang berbasis pada efektivitas. Memiliki secarik sertifikat atau pekerja berpendidikan merupakan signal bagi lingkungan bahwa seseorang merupakan pekerja modern, perusahaan yang bertanggung jawab menggunakan kriteria rasional dalam menyeleksi dan mempromosikan personilnya.

Bab 6

PENDIDIKAN AKUNTANSI LINGKUNGAN

Gray (2006) yang menyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan selama ini tidak benar-benar berakar dari konsep *sustainability* (keberlanjutan) dan *ecological* (ekologis). Seiring dengan berkembangnya isu lingkungan global, terjadi perubahan paradigma akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya pada transaksi keuangan tetapi juga transaksi peristiwa sosial dan lingkungan. Hal ini mengandung implikasi bahwa laporan tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, melainkan juga mencakup pelaporan sosial dan lingkungan. Lako (2011) menyatakan urgensi reformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi keberlanjutan, sebab relevan dengan realitas akuntansi saat ini. Realitas yang ada perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan setiap tahunnya meningkat sehingga peran akuntan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan semakin diperhitungkan. Kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan.

Berdasarkan SK Mendiknas No.045/u/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya, kompetensi akuntan didefinisikan sebagai sebuah kapabilitas dan kemampuan yang terdiri dari pengetahuan,

nilai-nilai profesional, etika, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan profesi akuntan (Chaker & Abdullah, 2011).

Seorang lulusan Sarjana Akuntansi yang kelak menjalani profesi akuntan dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya sejalan dengan beragam kebutuhan dan tuntutan dunia kerja, karena itu pendidikan sebagai cara meningkatkan kompetensi dapat dilakukan dengan memilih model yang tepat. Ng, Leung, & Lo (2017) merumuskan kompetensi keberlanjutan secara spesifik yang dikembangkan dari meta-kompetensi Fleming, model holistik kompetensi professional Cheetham dan Chivers, dan SECI Model Nonaka dan Takeuchi. Sehingga Ng et al., (2017) mengajukan kompetensi keberlanjutan secara spesifik yang terdiri dari empat komponen utama :

- 1) Kompetensi Fungsional, yakni kemampuan untuk melakukan berbagai tugas berbasis kerja (*work-based tasks*) yang efektif menghasilkan hasil yang spesifik;
- 2) Kompetensi Personal atau Perilaku, ini adalah kemampuan untuk menerapkan perilaku yang sesuai dan dapat diamati dalam situasi yang berhubungan dengan pekerjaan;
- 3) Kompetensi Pengetahuan atau Kognitif, merupakan kepemilikan pengetahuan berbasis kerja yang sesuai dan kemampuan untuk menerapkan ini dengan efektif;
- 4) Kompetensi Nilai atau Etika, yaitu kepemilikan nilai-nilai pribadi dan profesional yang sesuai dan kemampuan untuk membuat penilaian yang baik berdasarkan hal-hal ini dalam situasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Keterkaitan kompetensi etis dengan nilai menekankan bahwa nilai seperti pengetahuan, tidak banyak gunanya kecuali diterapkan secara efektif. Kompetensi etis ini mengacu pada penerapan nilai-nilai yang efektif dan tepat dalam pengaturan profesional.

Bab 7

PELAPORAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN: PERSPEKTIF INSTITUSIONAL

Perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan cenderung memiliki kemiripan dikarenakan tekanan institusional berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah serta tuntutan dari stakeholder lainnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan lebih memilih meniru (mimetic) praktik perusahaan lain bukan karena memahami esensi penerapan praktik tersebut. Perusahaan bersaing bukan hanya untuk menarik perhatian pelanggan atau investor tetapi juga untuk legitimasi institusional. Oleh karena itu, dari perspektif institusional penerapan akuntansi sosial dan lingkungan dalam kaitannya dengan pelaporan sosial dan lingkungan digambarkan dengan empat bentuk “penyesuaian” yakni kategorial, struktural, prosedural, dan personil.

7.1 “Penyesuaian” Kategorial dalam Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Fokus utama pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan apabila dilihat dari perspektif institusional adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud yaitu regulasi untuk pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas (PT) dan regulasi pemerintah Daerah seperti Perda Kaltim No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta menyesuaikan dengan agenda pemerintah setempat.

Praktik “penyesuaian” oleh perusahaan tentang bagaimana mereka menginstitutionalisasikan peraturan terkait dalam institusinya tergambar dari apa yang menjadi alasan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dikarenakan tanggung jawab tersebut diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana menyatakan bahwa perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Serta bagi pelanggar yang melanggar undang–undang tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut. Maka berdasarkan teori institusional, kondisi tersebut merupakan bentuk dari tahap penyesuaian kategorial, dimana keseragaman yang dilakukan organisasi didasari oleh sebuah sistem keyakinan kognitif (dalam hal ini berhubungan dengan penginternalisasian peraturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan), karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka (DiMaggio dan Powell, 1992).

7.2. “Penyesuaian” Struktural dalam Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Ternyata disamping alasan kepatuhan akan aturan, perusahaan melakukan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena tuntutan yang disampaikan oleh lingkungan bisnis, masyarakat dan organisasi non pemerintahan. Saat sebuah perusahaan melakukan program CSR dan melakukan pelaporan, mereka juga bisa terlibat dengan pihak-pihak lain yang memperhatikannya, di luar pemerintah.

Selanjutnya, dalam tahap penyesuaian struktural, dijelaskan oleh DiMaggio dan Powel (1992) muncul karena dampak dari peraturan pemerintah tadi, ketidakpastian lingkungan atau kebutuhan akan legitimasi. Sehingga, sebagai sebuah institusi, perusahaan yang menginstitutionalisasikan aturan tersebut berkewajiban melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Untuk kemudian mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungannya itu kepada para *stakeholder* sebagai salah satu upaya perolehan legitimasinya. Namun, walaupun dalam peraturan tersebut pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia sudah wajib diungkap, namun item-item tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*).

7.3. “Penyesuaian” Prosedural dalam Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Dari kacamata teori institusi, hal ini merupakan bagian dari penyesuaian prosedural, yakni saat organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Maka dengan adanya karakter sukarela, perusahaan dapat mengoperasionalkan pelaporan atas aturan-aturan tadi sesuai dengan kebijakan dan aktivitas yang dilakukannya. Di samping itu dikarenakan adanya pilihan-pilihan bentuk implementasi CSR yang halal dilakukan perusahaan.

Laporan kegiatan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan juga disesuaikan dengan kebutuhan pemakai informasi. Untuk laporan ke pemerintah lokal atau masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi, perusahaan memberikan laporan implementasi dari kegiatan CSR saja, namun untuk kebutuhan pemakai informasi yang lebih luas seperti investor maupun pelanggan perusahaan dalam

bentuk SR. Inilah lebih jelasnya bentuk dari penyesuaian prosedural yang dilakukan institusi perusahaan.

7.4. *“Penyesuaian” Personil: Pelaku Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan*

Identifikasi penyesuaian organisasi berikutnya dalam teori institusional setelah dilakukannya tahap penyesuaian kategorial, struktural dan prosedural yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tahap penyesuaian personil (DiMaggio dan Powell, 1983:147). Bentuk penyesuaian tersebut antara lain menggunakan personil yang spesifik, kebutuhan terhadap lisensi atau akreditasi untuk memenuhi kualifikasi personil dalam posisi kunci. Pada tahap ini, perusahaan berkolaborasi dengan para profesional, dengan mempertimbangkan pengalaman dan pelatihan mereka, untuk menghasilkan pengetahuan profesional yang akan mengatasi masalah (Martinez, et.al, 2016) dalam hal ini yaitu pelaporan keberlanjutan.

Dalam hal ini, penyesuaian personil yang dilakukan perusahaan terhadap aturan-aturan institusi dimana organisasi modern diatur oleh berbagai aturan spesialisasi, biasanya disertai dengan sertifikat profesional. Di sini sertifikat menjadi sangat penting sebagai bagian dari penyesuaian yang dilakukan organisasi. Hasil penelitian menggambarkan personil handal menurut perusahaan adalah orang-orang yang telah mengikuti training GRI. Di Indonesia, penyelenggara Training GRI adalah National Center for Sustainability Reporting (NCSR) yang merupakan Mitra Pelatihan Bersertifikat GRI, telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan sertifikasi profesional untuk Pelaporan Keberlanjutan sejak tahun 2007. Setelah mengikuti training tersebut, peserta yang lulus ujian untuk mendapat sertifikasi berhak mendapat gelar CSRS (Certified Sustainability Reporting Specialist). Perspektif institusional memandang sertifikasi merupakan sinyal bahwa perusahaan

memiliki personil yang handal dalam pelaporan.

Program CSRS berfokus pada orang yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan manajemen berkelanjutan CSR yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas. Training CSRS ini tidak mensyaratkan kualifikasi tertentu, misal training ini dapat diikuti oleh lulusan strata satu dari segala disiplin ilmu. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan untuk menyusun *best practice–sustainability report*, dengan menggunakan acuan dari Global Reporting Initiative (GRI). Walaupun sertifikasi CSRS dapat diikuti multidisiplin ilmu, namun sebagai akuntan semestinya hal ini ditangkap sebagai sebuah peluang dan tantangan. Sebab aktivitas yang ada dalam laporan keberlanjutan yang dibuat perusahaan sebenarnya merupakan bagian yang wajib dilaporkan nilai materinya dalam laporan keuangan perusahaan sehingga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang mengikutinya. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan aktivitas CSR sebagai biaya perseroan (*cost/expenses*) sesuai kepatutan dan kewajaran. Maka bentuk penyesuaian personil yang diutarakan institusi ini dapat menjadi sinyal kebutuhan akan profesional akuntan yang memiliki kompetensi holistik tersebut.

Bab 8

TRANSFORMASI SUSTAINABILITY REPORTING MENUJU INTEGRATED REPORTING: PELUANG BARU BAGI AKUNTAN?

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) semakin mendapat perhatian dalam praktik bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan. Menurut Said, et.al. (2009), bahwa laporan keberlanjutan menjamin akan kepentingan pemegang saham, atau investor yang ada, sehingga perlu adanya keterkaitan dengan implementasi tatakelola perusahaan yang efektif. Selain SR sebagai pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sebagai laporan keuangan saja), SR juga mendukung strategi perusahaan, serta dapat menunjukkan komitmen terhadap perkembangan berkelanjutan (Dilling, 2009:19).

Namun dalam praktiknya, perusahaan mengindikasikan minimnya sumberdaya akuntan yang juga memiliki pemahaman dan sertifikasi terkait bidang pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Atau dalam ranah akuntansi kompetensi ini berada dalam lingkup akuntansi sosial dan lingkungan (seringkali diistilahkan dengan *environmental accounting* atau *green accounting* atau *sustainability accounting*). Meski diakui perusahaan bahwa akan sangat membantu dalam praktiknya apabila mereka memiliki personil akuntan yang menawarkan kompetensi di bidang tersebut.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa ada kekosongan profesional akuntan pada bagian pelaporan CSR di perusahaan. Salah

satu informan yang merupakan bagian Human Resource menyebutkan bahwa selama ini kebutuhan personil belum mengarah kepada spesialisasi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Namun, ke depannya pasti mengarah kepada kompetensi di bidang pelaporan Sustainability Reporting maupun Assurance/Audit. Sertifikasi untuk kompetensi di bidang penyusunan pelaporan disebut sebagai Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), dan untuk bidang *assurance* disebut sebagai Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA).

Ketika sebuah laporan keberlanjutan menjadi penting, maka saat itu pula profesi CSRS menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam rantai penghubung informasi dari manajemen perusahaan kepada stakeholders perusahaan. Profesi CSRS berperan dalam menyiapkan data dan informasi, menentukan materialitas, juga menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan yang handal (Kurniawan, 2017). Sedangkan untuk profesi CSRA, menurut NCSR, seorang CSRA memiliki kapabilitas untuk memeriksa kelengkapan dan kepatuhan laporan keberlanjutan serta menilai pelaporan keberlanjutan termasuk interpretasi data dan kinerja yang dilaporkan.

Perkembangan berikutnya dari pelaporan keberlanjutan adalah munculnya konsep pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*). Pelaporan terintegrasi merupakan bentuk penyampaian seluruh informasi baik keuangan, non keuangan, dan aspek-aspek lain perusahaan. Saat ini di berbagai negara, *integrated reporting* (IR) masih pada fase awal pengadopsian. Di Indonesia sendiri pengungkapan IR bersifat sukarela (*voluntary*). Hal itu menunjukkan pentingnya peran akuntan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan mengembangkan tren tuntutan pasar global, yaitu IR. Di masa mendatang, IR berpotensi menjadi model utama pelaporan perusahaan. Perkembangan IR dan adanya tuntutan

stakeholders menjadi tantangan bagi perusahaan dan profesi akuntan untuk meningkatkan kualitas pelaporan khususnya laporan tahunan (Tarigan dan Samuel, 2014).

Namun, kondisi di Indonesia, profesi CSRS dan CSRA masih langka dijumpai termasuk di dalamnya akuntan yang memiliki sertifikasi tersebut. Ketika GRI ke depannya menjadi sebuah standar, tidak sebagai guideline, kemudian era laporan keberlanjutan menjadi era laporan terintegrasi, disinilah juga letak peluang bagi para akuntan. Maka bentuk penyesuaian yang dilakukan institusi akan berdampak luas sampai pada kebutuhan untuk pemenuhan profesional dalam perusahaan mereka. Contohnya, salah satu spesialisasi dari akuntansi lingkungan ialah pelaporan—terkait bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana dampak lingkungannya ke pihak eksternal perusahaan seperti investor dan regulator. Lebih dari sekadar akuntan pada umumnya, akuntan sosial dan lingkungan harus dapat bekerja sama dengan profesional dari berbagai disiplin ilmu, termasuk dari kalangan ilmuwan, akademisi, manajer risiko, regulator, dan profesional lainnya. Sehingga, perguruan tinggi sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyedia akuntan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, untuk mendukung proses institusionalisasinya, sudah semestinya turut mempertimbangkan perkembangan kebutuhan *stakeholder*-nya tersebut.

Bab 9

PENDIDIKAN AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS* PERGURUAN TINGGI

Berkaca dari realitas institusi yang menjadi bagian penelitian ini, menimbulkan kesadaran akan pentingnya akuntan yang memiliki kompetensi terkait akuntansi sosial dan lingkungan selain kompetensi umum yang telah dikenal sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi juga perlu mempertimbangkan seperti apa sebenarnya kompetensi ekstra yang dibutuhkan *stakeholder*-nya.

9.1. Pendidikan dan Kompetensi Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Seiring dengan berkembangnya isu lingkungan global, terjadi perubahan paradigma akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya pada transaksi keuangan tetapi juga transaksi peristiwa sosial dan lingkungan. Hal ini mengandung implikasi bahwa laporan tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, melainkan juga mencakup pelaporan sosial dan lingkungan. (Yarime et al. 2012) menyatakan urgensi reformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi keberlanjutan, sebab relevan dengan realitas akuntansi saat ini. Realitas yang ada perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan setiap tahunnya meningkat sehingga peran akuntan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan semakin diperhitungkan. Kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan didefinisikan

sebagai konsep dinamis yang memanfaatkan aspek kesadaran masyarakat, pendidikan, dan pelatihan untuk menciptakan dan meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan antara berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai untuk menciptakan dan menikmati masa depan yang berkelanjutan (Lange 2013). Dunia pendidikan, kaitannya dengan perguruan tinggi, memiliki perilaku fungsional mereka sendiri untuk melakukan perubahan, seperti mengajarkan praktik keberlanjutan sehingga secara luas mempengaruhi masyarakat (Lange, 2013). Inilah peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan (Stephens et al., 2008); (Sharma 2017). Stephens et al. (2008) mengusulkan bahwa sebagai agen perubahan maka perguruan tinggi dapat menyediakan model praktik berkelanjutan untuk masyarakat, mengajar mahasiswa bagaimana menangani masalah, dan melakukan *practice based research*. Sebagai agen perubahan, perguruan tinggi merancang kurikulum yang juga mencakup pengetahuan dan keterampilan baru untuk mempromosikan dan meningkatkan topik keberlanjutan. Sehingga proses “penambahan” sebuah kompetensi baru bagi para calon akuntan dalam institusi pendidikan terkait dengan isu sosial dan lingkungan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan SK Mendiknas No.045/u/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut Mulyati (2012) mempertegas makna kompetensi sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang cukup dalam dan bersifat sementara, oleh karenanya selain merupakan suatu penyebab, ia juga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang dalam berbagai situasi dan tugas kerja. Secara aktual, kompetensi dapat memprediksi kinerja

seseorang karena dapat menunjukkan siapa yang lebih baik dari pada yang lain berdasarkan *specific criterion* atau suatu standar tertentu. Sehingga, kompetensi akuntan dapat didefinisikan sebagai sebuah kapabilitas dan kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, nilai-nilai profesional, etika, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan profesi akuntan (Chaker dan Abdullah, 2011). Ketika seseorang memanfaatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang diperlukan sesuai standar yang dipersyaratkan maka kompetensi dianggap telah tercapai sesuai dengan definisi yang diberikan oleh IFAC (2008) yakni kompetensi merupakan kemampuan peran kerja atau tugas yang relevan dengan standar yang dipersyaratkan.

Seorang lulusan Sarjana Akuntansi yang kelak menjalani profesi akuntan dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensinya sejalan dengan beragam kebutuhan dan tuntutan dunia kerja, karena itu pendidikan sebagai cara meningkatkan kompetensi dapat dilakukan dengan memilih model yang tepat. Ng et al. (2017) merumuskan kompetensi keberlanjutan secara spesifik yang dikembangkan dari meta-kompetensi Fleming, model holistik kompetensi professional Cheetham dan Chivers, dan SECI Model Nonaka dan Takeuchi. Sehingga (Sugiyono 2006) mengajukan kompetensi keberlanjutan secara spesifik yang terdiri dari empat komponen utama:

- 1) Kompetensi Fungsional, yakni kemampuan untuk melakukan berbagai tugas berbasis kerja (*work-based tasks*) yang efektif menghasilkan hasil yang spesifik;
- 2) Kompetensi Personal atau Perilaku, ini adalah kemampuan untuk menerapkan perilaku yang sesuai dan dapat diamati dalam situasi yang berhubungan dengan pekerjaan;
- 3) Kompetensi Pengetahuan atau Kognitif, merupakan kepemilikan pengetahuan berbasis kerja yang sesuai dan kemampuan untuk menerapkan ini dengan efektif

- 4) Kompetensi Nilai atau Etika, yaitu kepemilikan nilai-nilai pribadi dan profesional yang sesuai dan kemampuan untuk membuat penilaian yang baik berdasarkan hal-hal ini dalam situasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Keterkaitan kompetensi etis dengan nilai menekankan bahwa nilai seperti pengetahuan, tidak banyak gunanya kecuali diterapkan secara efektif. Kompetensi etis ini mengacu pada penerapan nilai-nilai yang efektif dan tepat dalam pengaturan profesional.

9.2. Kompetensi Akuntan Sosial dan Lingkungan

Berkaca dari realitas kebutuhan institusi korporasi yang menjadi bagian penelitian ini, menimbulkan kesadaran akan pentingnya akuntan yang memiliki kompetensi terkait akuntansi sosial dan lingkungan selain kompetensi umum yang telah dikenal sebelumnya, sehingga perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana akuntansi juga perlu mempertimbangkan seperti apa sebenarnya kompetensi tambahan yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan. Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah mengungkapkan dimensi kompetensi, terkait akuntansi sosial dan lingkungan yang diharapkan *stakeholder* dimiliki oleh para akuntan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh beberapa temuan yang dalam penelitian ini berupa pemetaan kebutuhan tersebut yang dianalisis menggunakan model kompetensi profesional Ng et al., (2017). Berikut adalah hasil analisis dan pemetaan yang memaparkan empat kompetensi keberlanjutan yang spesifik berdasarkan model Ng et al., 2017:

1. Kompetensi Fungsional:

Kompetensi fungsional meliputi (a) kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengenali pendekatan dan metode pelaporan CSR/Sustainability, dan (b) pengetahuan tentang metodologi untuk penilaian risiko keberlanjutan. Kompetensi ini

sesuai dengan pernyataan informan yang menjadi pelaku di bidang pelaporan akuntansi keberlanjutan, dimana kompetensi untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang penting untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan standar pelaporan yang menjadi acuan, seperti GRI dan ISO 26000. Acuan ataupun standar pelaporan juga akan membantu *stakeholder* dalam menilai kinerja perusahaan: ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jankalova 2016; Kaya 2016). Selain mengidentifikasi informasi, kemampuan membaca laporan keberlanjutan menjadi kompetensi tambahan.

Kompetensi ini menurut Manoliadis (2009); Osagie et al. (2016) mengarah pada bagaimana memahami CSR, Standar CSR, dan regulasi CSR bahwa akuntan dan siapa saja yang berada dalam divisi Keberlanjutan harus memahami bagaimana menerapkan dan mengatasi peraturan baik dalam lingkup industri, nasional dan internasional. Selain aspek regulasi ini, mereka pun harus memahami apa yang menjadi penggerak sosial tantangan CSR, memiliki kemampuan untuk menyusun peraturan fungsional (misalnya, kode etik) dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab bagi sosial dan lingkungan.

2. Kompetensi Personal atau Perilaku

Kompetensi Personal atau Perilaku meliputi (a) Kemampuan untuk mengkomunikasikan isu keberlanjutan dalam kaitannya dengan masyarakat dan komunitas bisnis, (b) Mampu berpikir mandiri dan kemampuan riset atas permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini mengungkap realitas bahwa terdapat berbagai kecakapan yang harus dimiliki oleh akuntan jika ingin berkecimpung di dunia akuntansi sosial dan lingkungan. Posisi dan peran tim yang bertanggung jawab atas kegiatan CSR perusahaan juga menjadi ujung tombak perusahaan dalam

menginformasikan strategi keberlanjutan yang dijalankannya kepada *stakeholders*. Misal dalam kegiatan sosialisasi program CSR maupun dalam penyusunan laporan keberlanjutannya, akuntan yang menjadi bagian tim ini semestinya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik serta keterampilan dalam menentukan pilihan kata dan tampilan yang menarik dalam Sustainability Report agar apa yang diharapkan perusahaan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Burkhardt-Holm dan Chebbi, (2008); Osagie et al., (2016), kompetensi perilaku (disebut sebagai kompetensi interpersonal) ialah kemampuan mengelola program CSR yakni kemampuan untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, juga mengelola proyek, keputusan, dan strategi yang mendukung CSR. Selain itu, profesional CSR harus bertanggung jawab kepada perusahaan dan masyarakat, mengembangkan dan menerapkan solusi untuk masalah praktis dan logis terkait CSR, bersikap persuasif, dapat mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang luas, memiliki kemampuan komunikasi dan *networking* yang baik (lokal dan global), bekerja dengan baik dalam kolaborasi multidisiplin dan multi-budaya, mengumpulkan dana, menulis laporan dan proposal terkait CSR, serta mampu mempresentasikan hasil kegiatan CSR.

3. Kompetensi Pengetahuan atau Kognitif

Suatu kesadaran akan permasalahan terkait regulasi dan keprihatinan profesi tentang isu keberlanjutan baik lokal maupun global. Kesadaran informan dalam penelitian ini akan perkembangan yang pesat dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan memunculkan dimensi kompetensi baru yang dirasa

penting untuk dimiliki para akuntan. Kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal perkembangan isu keberlanjutan terutama terkait dengan kebijakan dan peraturan pihak-pihak ataupun lembaga yang berwenang menjadi hal yang tidak bisa dilewatkan. Seperti kondisi berikut ini, dimana beberapa tahun lalu dalam penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan menggunakan GRI Guidance sebagai acuan mereka. Namun perkembangan berikutnya, GRI Standards menjadi acuan yang harus disadari dan dikuasai oleh akuntan sebab standar ini yang akan menggantikan GRI Guidance yang selama ini digunakan dan mulai diimplementasikan pada tahun 2018.

Begitupun Osagie et al., (2016); dan Wiek et al., (2011), dalam hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa kemampuan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam menghadapi tantangan CSR perlu dimiliki oleh seorang akuntan sosial dan lingkungan. Kemampuan ini seperti mampu menganalisis isu CSR terkait perilaku, konsep kunci, dan teori yang akan berkembang di masa depan. Kompetensi ini menuntut kemampuan berpikir kritis dan dapat mengantisipasi konsekuensi potensial dari tindakan organisasi dan individu.

4. Kompetensi Nilai atau Etika

Kompetensi ini berupa pemikiran strategis tentang isu keberlanjutan mulai dari sudut pandang etika hingga isu-isu strategis mengenai kontribusi organisasi terhadap keberlanjutan. Kompetensi ini menurut Osagie et al., (2016) merupakan hal mendasar bagi individu untuk melaksanakan CSR. Kemampuan untuk bersikap etis, empati, berkomitmen, antusias, kreatif, berpikir terbuka, fleksibel, sabar, gigih, dan pragmatis dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian, mereka mampu untuk melakukan penyesuaian antara tujuan ekonomi perusahaan dan

tujuan CSR tanpa kehilangan etika dan nilai moral. Kompetensi ini diwujudkan dalam kesesuaian antara apa yang diinginkan-dikatakan-dilakukan.

Terkait keempat dimensi kompetensi tersebut, penelitian (Ng, Leung, dan Lo 2017) menunjukkan bahwa peran utama pendidikan tinggi dalam bisnis adalah kepekaan terhadap dinamika perubahan yang sedang berlangsung dalam dunia bisnis. Ada keterampilan dan pengetahuan baru yang diharapkan dari generasi penerus akuntan professional. Lulusan pendidikan akuntansi masa depan ini harus kompeten dalam pembuatan laporan, mampu bersikap etis, menyadari masalah peraturan terkait, serta mampu menganalisis dan menilai risiko keberlanjutan. Profesi akuntan masa depan ini akan membantu dalam melindungi dan meningkatkan akuntabilitas serta kinerja perusahaan terhadap keberlanjutan dunia.

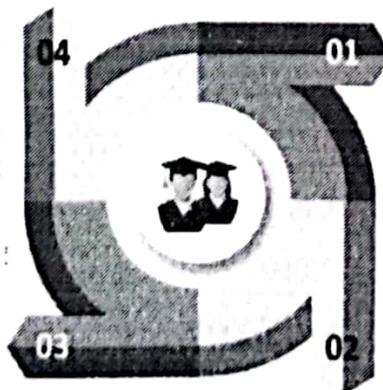
Secara spesifik, model kompetensi yang dihasilkan penelitian ini dengan mengadopsi model kompetensi keberlanjutan (Ng et al., 2017) dapat dilihat pada gambar berikut:

Kompetensi Nilai atau Etika

- a) Memahami perilaku etis berdasarkan standar etika profesi
- b) Mampu menganalisis dan menilai isu-isu keberlanjutan dari sudut pandang etika

Kompetensi Pengetahuan/ Kognitif

Pemahaman yang baik terkait peraturan/kebijakan pemerintah dan organisasi profesi, seperti UU PT, Perda, Standar Akuntansi



Kompetensi Fungsional

Mampu mengidentifikasi dan menyajikan informasi dalam Laporan Keberlanjutan berdasarkan:

- 1) GRI
- 2) ISO 26000

Kompetensi Personal/ Perilaku

- a) Mampu mengkomunikasikan isu keberlanjutan dengan masyarakat dan komunitas bisnis
- b) Berpikir mandiri dan mampu melakukan riset atas permasalahan keberlanjutan

Gambar 3 Model Holistik Kompetensi Keberlanjutan (Pendidikan Akuntansi Sosial dan Lingkungan)

Mekanisme dan pendekatan baru perguruan tinggi dalam mengajar dan melakukan penelitian dapat diimplementasikan dengan mendesain ulang kurikulum sesuai agenda keberlanjutan untuk pengembangan keterampilan, nilai, sikap dan kompetensi baru (Hazelton dan Haigh 2010). Di samping itu, perguruan tinggi perlu melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan di luar perguruan tinggi dalam mengenalkan “keberlanjutan”, tidak hanya secara teoritis tetapi juga melalui tindakan praktis di kampus (Braun-Wanke 2017; Fernández Chulián 2011). Keterlibatan *stakeholders* Perguruan Tinggi akan menjembatani antara teori maupun praktik sehingga mahasiswa dapat memahami konsep CSR dengan baik, mampu menyusun dan menganalisis laporan keberlanjutan, serta kemampuan bersikap serta memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan semangat ‘keberlanjutan’.

Bab 10

SIMPULAN DAN SARAN

10.1 Simpulan

Implementasi UU No 40 Tahun 2007 dan Perda Kaltim No 03/2013 mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung sosial dan lingkungan. Berdasarkan teori institusional, kondisi ini membuat perusahaan, yang juga merupakan bentuk institusi, melakukan berbagai “penyesuaian” di dalam organisasinya. Penyesuaian-penyesuaian tersebut terjadi dalam berbagai tahap dan tingkatan di dalam tubuh perusahaan, seperti penyesuaian tahap kategorial dimana perusahaan menginstitusionalisasikan peraturan-peraturan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan dan demi ketahanan institusinya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian struktural, saat internalisasi nilai-nilai dan aturan dari institusi tersebut mempengaruhi struktur dan strategi perusahaan demi perolehan legitimasi, serta dilanjutkan dengan penyesuaian prosedural dalam hal pilihan-pilihan cara yang dilakukan perusahaan untuk mendukung proses institusionalisasi sebelumnya. Tahap lainnya yang tidak kalah penting adalah penyesuaian personil, dimana perusahaan menerapkan kriteria tertentu terkait sumberdaya manusia yang diharapkan dapat membantu tercapainya segala tahap penyesuaian institusi.

Kriteria yang diterapkan perusahaan inilah yang kemudian menjadi bekal bagi peneliti dalam memetakan bagaimana komeptensi profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya terkait profesi akuntan dengan kompetensi tambahan di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam

bentuk laporan keberlanjutan yang wajib disusun oleh perusahaan selama ini memang masih dilakukan oleh non akuntan, karena minimnya sumber daya yang tersedia dan membuat mereka harus berkolaborasi dengan para professional dengan berbagai disiplin ilmu. Penyusunan laporan berkelanjutan dilakukan oleh non-akuntan dikarenakan penekanan perusahaan adalah pada sisi implementasi, orientasi pelaporan adalah untuk memenuhi regulasi, dan minimnya sumberdaya akuntan yang berkompeten di bidang akuntansi sosial dan lingkungan.

10.2 Saran

Oleh karena itu peran akuntan yang kompeten pada bidang akuntansi sosial dan lingkungan kemudian sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan peluang bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan lulusannya agar mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi mengenai pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan, yang berarti bahwa lulusan sarjana akuntansi sudah seharusnya meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Pendidikan akuntansi yang berbasis akuntansi sosial dan lingkungan ke depannya perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2010. Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi: Akrual*, 1(2): 80-100
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Braun-Wanke, Karola. 2017. "Learning and Teaching for a Sustainable Future." In *Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education*, diedit oleh Walter Leal Filho, Ulisses M. Azeiteiro, Fatima Alves, dan Petra Molthan-Hill, 4:15–30. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47895-1>.
- Burkhardt-Holm, Patricia, dan Camelia Chebbi. 2008. "Master's Degree in Sustainable Development in Switzerland, the First Master Course Comprising Three Faculties." *Environmental science and pollution research international* 15 (2):136–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1065/espr2008.02.478>.
- Chaker, Mohammed Naim, dan Tengku Akbar Tengku Abdullah. 2011. "What Accountancy Skills Are Acquired at College/ ?" *International Journal of Business and Social Science* 2 (18):193–99.
- Dilling. 2009. Sustainability Reporting In A Global Context : What Are The Characteristics of Corporatons That Provide High Quality Sustainability Reports An Empirical Analysis. *International Business & Economics Research Journal* 9 (1), 126-142
- DiMaggio, P.J. dan W.W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review*.

DiMaggio dan Powell. 1992. *New Institutional Analysis in Organization*. University of Chicago Press.

Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.

Farizhabib, 2016, "Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia", tersedia pada <https://wordpress.com/2016/02/22/perkembangan-sustainability-reportingdi-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 23.00

Fernández Chulián, Manuel. 2011. "Constructing new accountants: The role of sustainability education." *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review* 14:241–65. [https://doi.org/10.1016/S1138-4891\(11\)70034-6](https://doi.org/10.1016/S1138-4891(11)70034-6).

Freeman, R. E; A. C. Wicks, dan B. Parmar. 2004. Stakeholder theory and "The corporate objective revisited." *Organization Science*, 15(3): 364–369

Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Frynas, J.G. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gray, R. H; D. L Owen, dan C. Adams. 1996. *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. London: Prentice Hall.

Gray, Rob. 2006. Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation?: Whose value? Whose creation?, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(6): 793–819

Ghozali, I dan Chariri, A. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hazelton, James, dan Matthew Haigh. 2010. "Incorporating Sustainability into Accounting Curricula: Lessons Learnt from an Action to

- Research Study.” *Accounting Education: An International Journal* 19(1–2):159–78. <https://doi.org/10.1080/09639280802044451>.
- Idris. 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Jurnal Economac*, 2(2)
- ISO (*International Organization for Standardization*) 26000. 2010. *Guidance on Social Responsibility*
- Jankalova, Miriam. 2016. “Approaches to the Evaluation of Corporate Social Responsibility.” *Procedia Economics and Finance* 39 (November 2015):580–87. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30302-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30302-1).
- Januarti, Indira, dan Dini Apriyanti. 2005. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.” *MAKSI* 5 (2):227–53.
- Kaya, Idil. 2016. “The Mandatory Social and Environmental Reporting: Evidence from France.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 229:206–13. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.130>.
- Kettunen, Juha. 2015. “Stakeholder relationships in higher education.” *Tertiary Education and Management* 21 (1):56–65. <https://doi.org/10.1080/13583883.2014.997277>.
- Kurniawan, P.S., 2017. “Profesi *Certified Sustainability Reporting Specialist*, Pelaporan Keberlanjutan, dan Teori Enterprise (Suatu Tinjauan Mengenai Profesi CSRS dalam Pelaporan Keberlanjutan).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 6(1), April 2017.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Lange, Deborah E. de. 2013. “How do Universities Make Progress? Stakeholder-Related Mechanisms Affecting Adoption of Sustainability in University Curricula.” *Journal of Business Ethics* 118(1):103–16.

- Lindawati, A.S.L. dan M.E. Puspita. 2015. Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma - JAMAL*, 6(1): 1-174
- Martínez, J.B., Fernández, M.L., dan Fernández, P.M.R. 2016. Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives. *European Journal of Management and Business Economics* 25 (1), 8-14
- Manoliadis, Odysseus. 2009. "Education For Sustainability: Experiences From Greece." *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice* 135:70–74. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/161/1/012103>. National Center for Sustainability Reporting. "What is CSRA?" tersedia pada <http://www.ncsr-id.org/csra/what-is-csra/> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 15.45
- Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*.
- Ng, Artie W., Tiffany C.H. Leung, dan Jack M.K. Lo. 2017. "Developing Sustainability Competence for Future Professional Accountants: The Integrative Role of an Undergraduate Program." In *Handbook of Theory and Practice and Sustainable Development in Higher Education*, 1:119–36. Switzerland: Springer.
- O'Donovan, Gary. 2002. Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 Issue: 3, pp.344-371
- Osagie, E. R., R. Wesselink, V. Blok, T. Lans, dan M. Mulder. 2016. "Individual Competencies for Corporate Social Responsibility: A Literature and Practice Perspective." *Journal of Business Ethics* 135 (2):233–52. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2469-0>.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Said, Zainuddin dan Haron. 2009. The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2): 212.

Sharma, Rashika. 2017. "Enhancing Sustainability Awareness through Social Learning Experiences on Campuses" 11 (11):2524–27.

Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. Salemba Empat: Jakarta.

Sonja E. Pippin, Jessica L. Weber, Jeffrey A. Wong, dan Jason Bergner. 2016. "The Inclusion of Sustainability in the Accounting Curriculum." CPA Journal Journal Content. 2016. <https://www.cpajournal.com/2016/06/17/inclusion-sustainability-accounting-curriculum/>.

Stephens, Jennie C., Maria E. Hernandez, Mikael Román, Amanda C. Graham, dan Roland W. Scholz. 2008. "Higher Education as a Change Agent for Sustainability in Different Cultures and Contexts." *International Journal of Sustainability in Higher Education* 9 (3):317–38. <https://doi.org/10.1108/14676370810885916>.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Sundaram, A. K. dan A. C. Inkpen. 2004. Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited": A Reply. *Organization Science*, 15(3): 350–363.

Tarigan, J. dan Samuel H., "Pengungkapan *Sustainability Report* dan Kinerja Keuangan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 16, No. 2, November 2014.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

- Villadsen, A. R. 2011. Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing, Gresik.
- Wiek, Arnim, Lauren Withycombe, Charles Redman, dan Sarah Banas Mills. 2011. "Moving Forward on Competence in Sustainability Research and Problem Solving." *Environment: Science and Policy Sustainable Development* 53 (2):3–13. <https://doi.org/10.1080/00139157.2011.554496>.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2002. *"Sustainable Development Reporting – Striking a Balance"*. WBCSD Report, Atar Roro Press, Switzerland.
- Yarime, Masaru, Gregory Trencher, Takashi Mino, Roland W. Scholz, Lennart Olsson, Barry Ness, Niki Frantzeskaki, dan Jan Rotmans. 2012. "Establishing Sustainability Science in Higher Education Institutions: Towards an Integration of Academic Development, Institutionalization, and Stakeholder Collaborations." *Sustainability Science* 7 (SUPPL. 1):101–13. <https://doi.org/10.1007/s11625-012-0157-5>.
- Zucker, Lynne G. 1987. Institutional Theory of Organization. *Annual Review of Sociology* 13:1, 443-464.

BIODATA PENULIS

Anisa Kusumawardani

Dosen tetap sejak tahun 2000 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (UNMUL). Pada tahun 2000 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi UNMUL. Kemudian gelar MSi diperoleh pada tahun 2002 dan Doktor Ilmu Ekonomi tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin. Peneliti aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Beberapa hasil penelitian juga telah dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

Irwansyah

Dosen tetap sejak tahun 2001 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (UNMUL). Pada tahun 1998 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi dari STIE YKPN. Kemudian gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada diperoleh pada tahun 2001 dan Doktor Ilmu Ekonomi tahun 2010 dari Universitas Hasanudin. Peneliti aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi.

Yoremia Lestari Ginting

Dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (UNMUL). Gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi diraihinya pada tahun 2007 dari Fakultas Ekonomi UNMUL. Sedangkan gelar Akuntan (2010) dan Magister Akuntansi (2012) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di samping sebagai dosen, juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di beberapa lembaga non-profit dan pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Penulis juga menaruh minat pada bidang akuntansi sosial dan lingkungan diantaranya sebagai *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS) melalui sertifikasi profesi di tahun 2018.

Fibriyani Nur Khairin

Sejak tahun 2009 sampai sekarang tercatat sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Pada tahun 2006 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi dari STIE Malangkececwara, kemudian melanjutkan ke jenjang pascasarjana dengan gelar Magister Sains Akuntansi (MSA) yang diperoleh pada tahun 2008 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB), dan saat ini sedang menempuh studi Doktoral di Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) FEB-UB. Penulis juga *concern* di bidang akuntansi sosial dan lingkungan atau akuntansi keberlanjutan dengan aktif terlibat dalam diskusi-diskusi pada Forum Dosen Akuntansi Manajemen dan CG-CSR (MACGCSR) yang digagas oleh IAI kompartmen Akuntan Pendidik serta melakukan riset-riset di bidang terkait. Pada tahun 2017 memperoleh sertifikasi profesi *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS) dan tahun 2018 untuk sertifikasi profesi *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRA). Dimana perolehan sertifikasi tersebut kemudian mengantarkan penulis untuk menjadi anggota *Institute of Certified Sustainability Practitioners* (ICSP) sejak tahun 2018.

Buku Monograf yang berjudul **"Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial dan Lingkungan"** ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai bidang terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, yang kemudian mendorong pentingnya untuk dihadirkan pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan dalam pembelajaran akuntansi di Perguruan Tinggi. Pendidikan akuntansi sosial dan lingkungan yang ditawarkan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan nilai lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses "menghadirkan" materi tersebut dalam sebuah institusi pendidikan tinggi, membutuhkan berbagai informasi-informasi terkait kebutuhan pasar (pengguna lulusan) atas kompetensi lulusan yang diharapkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan sebagai bahan pertimbangan. Sehingga, dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Perguruan Tinggi dalam memperoleh informasi kompetensi keberlanjutan secara spesifik yang dapat menjadi acuan dalam melakukan peninjauan kurikulum pendidikan akuntansi sehingga sarjana akuntansi yang dihasilkan memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan untuk menjawab tantangan dan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin mengarah pada diperlukannya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan oleh perusahaan.



ISBN 978-602-6257-50-5

